



KLIPING

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																			✓												

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
							✓				

TAHUN

2015

HALAMAN

3A.

BPK Kaltara Sambangi PJ Gubernur

Bahas Kesiapan Penerapan PP 71/2010

TANJUNG SELOR - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko didampingi beberapa pejabat Pemprov Kaltara menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara di rumah jabatannya, Rabu (19/8).

Kunjungan BPK ini terkait dengan kinerja serta kesiapan Pemprov Kaltara dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, sesuai dengan amanat Peraturan Perundangan (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Kami merasa akan lebih terjalin dengan baik untuk memberikan kelestarian BPK Kaltara memonitoring dan melakukan langkah-langkah terkait penerapan akuntansi berbasis akrual ini," kata Triyono.

Ia mengatakan akan terus meningkatkan kesiapan Pemprov Kaltara dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. "Artinya kami siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada BPK Kaltara, kami akan menerima apa yang menjadi rekomendasi. Saya mempunyai beban moral dalam menyandang wajar tanpa pengecualian (WTP), apa yang menjadi awal yang baik ini untuk bisa dipertahankan," jelasnya.

Triyono mengharapkan, BPK Kaltara tidak hanya nantinya melakukan pemeriksaan audit, tetapi juga memberikan unsur pembinaan kepada Pemprov Kaltara, mengingat sumber daya manusia (SDM) di Pemprov Kaltara terbatas.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Akuntansi Biro Keuangan, Sekretariat Provinsi Kaltara Pahyang Suryo menyebutkan, bahwa PP Nomor 71 Tahun 2010 sudah diterapkan, namun baru diberlakukan pada tahun 2015 ini.

"Maka itu kita harus mempersiapkan SDM kita, seperti

mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknologi, mengundang narasumber yang berkompeten dari kementerian maupun dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nanti tinggal BPK akan menilai bagaimana kesiapan kita dalam audit nantinya," sebutnya.

Menurutnya, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut merupakan hal baru bagi akuntansi. Pemerintah pusat telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Ini hal baru bagi akuntansi, BPK akan melihat sejauh mana kesiapan kita. Karena bagaimanapun BPK mempunyai kepentingan dalam melakukan audit nantinya. Salah satu standar yang dipakai dalam audit keuangan itu adalah standar kriterianya mempunyai kesesuaian dengan PP Nomor 71 Tahun 2010," tutup Pahyang (**hmsprov**).